

TRIWULAN IV (Per 31 Desember 2025)

LAPORAN EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

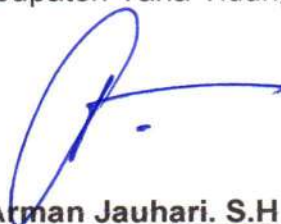
Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran serta indikator sebagai tolak ukur kinerja.

Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2025 Triwulan IV merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan RENJA yang digunakan untuk menilai tingkat capaian target kinerja dan daya serap anggaran Program/Kegiatan berdasarkan realisasi DPA.

Mengacu pada ketentuan diatas, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah melalui pengendalian dan evaluasi Renja sebagai instrument dalam pengukuran capaian kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan selain evaluasi hasil pelaksanaan Renja dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi dan tolak ukur penilaian kinerja pada unit kerja pelaksanaan program kegiatan. Evaluasi hasil akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Renja periode mendatang.

Kami menyadari dalam penyusunan evaluasi hasil Renja ini masih jauh dari sempurna, namun demikian hasil penyusunan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan agar tahun mendatang pelaksanaannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi.

Tana Tidung, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tana Tidung



Arman Jauhari. S.H
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19750709 200212 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan RENJA DPMPTSP	5
1.4. Metode Evaluasi RENJA DPMPTSP	6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP	8
BAB III PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA DPA, RENJA DAN RENSTRA DPMPTSP	9
3.1 Perbandingan Jumlah Program DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP	11
3.2 Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP	11
3.3 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP	12
BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA DPMPTSP	13
4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran	13
4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program	13
4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan	14
4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	16
4.5 Pencapaian Target Anggaran	19

BAB V	KENDALA ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ATAU KEGIATAN	22
BAB VI	PENUTUP	25
	6.1 Kesimpulan	25
	6.2 Rekomendasi	25
	LAMPIRAN	27
	DOKUMENTASI	28

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
Tabel 1.1	Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8
Tabel 3.1	Perbandingan DPA, RENJA dan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025	9
Tabel 4.1	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran	13
Tabel 4.2	Pencapaian Target Indikator Kinerja Program	14
Tabel 4.3	Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan	15
Tabel 4.4	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	16
Tabel 4.5	Pencapaian Target Anggaran	19

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran Perangkat Daerah, Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025.

Guna menjamin bahwa RENJA telah menjabarkan RENSTRA dengan baik, maka perlu dilakukan Evaluasi yang dilaksanakan setiap Triwulan sesuai dengan aliran dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan. Disamping itu, evaluasi juga sangat diperlukan guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan suatu program/kegiatan yang direncanakan. Melalui penyusunan Laporan Evaluasi RENJA setiap triwulan juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian dokumen perencanaan dari RENSTRA, RENJA dan pelaksanaannya.

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat dimana evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala-kendala yang dihadapi. Evaluasi RENJA Triwulan-IV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggambarkan kondisi Pencapaian hingga 31 Desember 2025. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RENJA tahun 2026.

Evaluasi Renja perangkat daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah. Evaluasi hasil Renja perangkat daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang

berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 berdasarkan:

1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 Nomor 5);

18. Perbup Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 72).
19. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025;
20. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan RENJA DPMPSTSP 2025

Laporan Evaluasi terhadap hasil RENJA tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program dan kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya.

Tujuan penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan evaluasi hasil RENJA Tahun 2025 berdasarkan target - target indikator yang tercantum dalam RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
2. Mendiskripsikan permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025;
3. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan RENJA Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

1.4 Metode Evaluasi RENJA DPMPTSP

Metode Evaluasi RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah dengan menggunakan formulir evaluasi RENJA yang akan diisi capaiannya oleh masing - masing bidang.

2. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi RENJA ini adalah dengan menghitung: (1) Persentase Capaian Kinerja masing - masing indikator dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja dalam RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; (2) Persentase Kinerja Keuangan dengan membandingkan antara realisasi keuangan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Skala Predikat Kinerja dan Realisasi Keuangan

No.	Interval Nilai Evaluasi s/d TW I	Interval Nilai Evaluasi s/d TW II	Interval Nilai Evaluasi s/d TW III	Interval Nilai Evaluasi s/d TW IV	Status
1.	$22,5\% \leq 100\%$	$45\% \leq 100\%$	$68\% \leq 100\%$	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$20\% \leq 22,5\%$	$39\% \leq 44\%$	$58\% \leq 67\%$	$76\% \leq 90\%$	Tinggi (T)
3.	$17\% \leq 19\%$	$33\% \leq 38\%$	$50\% \leq 57\%$	$66\% \leq 75\%$	Sedang (S)
4.	$13\% \leq 16\%$	$26\% \leq 32\%$	$39\% \leq 49\%$	$51\% \leq 65\%$	Rendah (R)
5.	$\leq 13\%$	$\leq 25\%$	$\leq 38\%$	$\leq 50\%$	Sangat Rendah (SR)

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) Kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian / realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi / masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis dilakukan dengan teknik perbandingan antara realisasi kinerja dan keuangan dengan target kinerja dan anggaran; dan analisis permasalahan yang hadapi perangkat daerah dalam pencapaian target RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMPTSP

Tujuan adalah pernyataan tentang hal - hal yang perlu dilakukan untuk menangani isu strategis yang dihadapi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Realisasi Investasi”**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Adapun

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2025
1.	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung	Realisasi Investasi PMA	Milyar	450.000.000.000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	100%
			Realisasi Investasi PMDN	Triliun	1.713.611.986.774	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang akan berinvestasi	2 Investor
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	94,5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal	90%
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
							Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP	100%

BAB III
PERBANDINGAN JUMLAH PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PADA DPA, RENJA DAN RENSTRA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Perbandingan DPA, RENJA dan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan DPA, RENJA dan RENSTRA Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	DPA	RENJA	RENSTRA
2.01	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	V	V	V
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	V	V	V
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	V	V	V
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	V	V	V
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	V	V	V
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	V	V	V
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	V	V	V
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	V	V	V
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	V	V	V
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	X	V	X
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	V	V	V
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	V	V	V
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	V	V	X
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	V	V	V
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	V	V	V
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	X	X	V
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	V	V	V
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	V	V	V
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	V	V	X
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	V	V
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	V	V	V
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	V	V	V
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	V	V	V
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	V	V	V
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	V	V	V

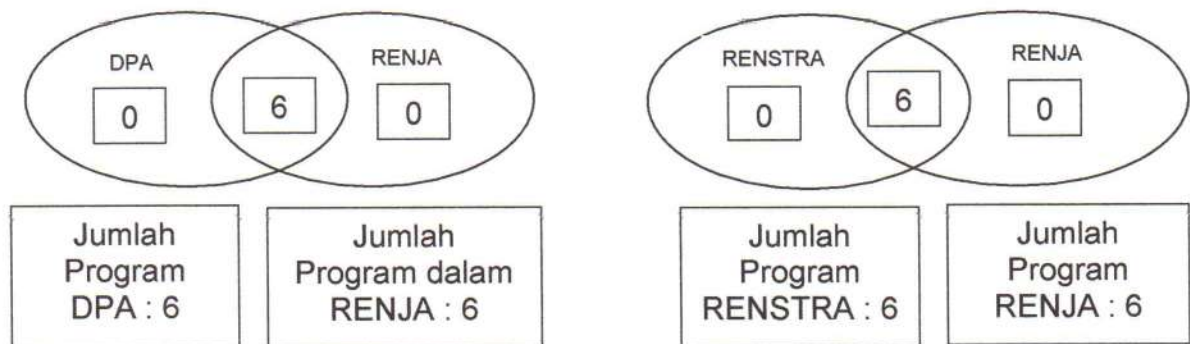
**Bab III Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada DPA, RENJA dan
RENSTRA DPMPTSP**

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	V	V	V
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	V	V	V
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	V	V	V
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	V	V	X
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	V	V	V
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	V	V	V
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	V	V	V
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	V	V	V
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	V	V	V
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	V	V	V
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan Usahanya	V	V	V
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	V	V	V
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	V	V	V
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	V	V	V
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	V	V	V

3.1 Perbandingan Jumlah Program DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP

Perbandingan antara jumlah Program dalam DPA, RENJA dan RENSTRA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* berikut :

Flowchart 1 :
Perbandingan Jumlah Program DPA, RENJA dan RENSTRA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025



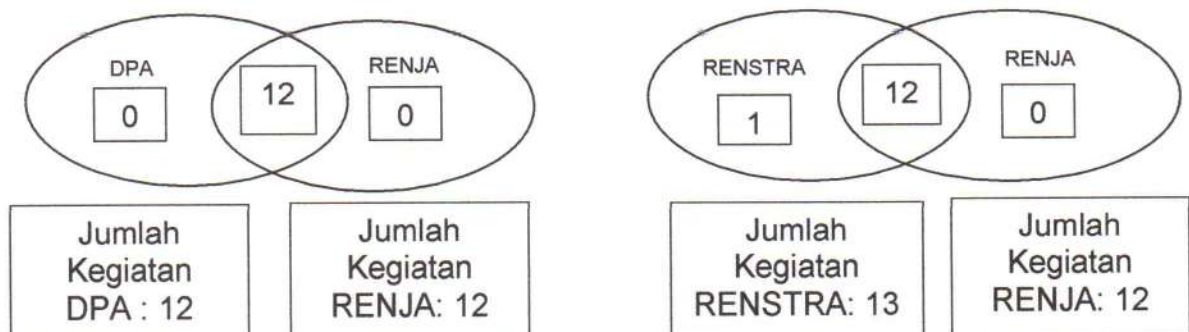
Dari *flowchart* dapat dilihat bahwa :

Jumlah Program yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada tahun 2025 (DPA) sama dengan jumlah program pada RENJA 2025 maupun RENSTRA 2021-2026.

3.2 Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP

Perbandingan antara jumlah kegiatan dalam DPA, RENJA dan RENSTRA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* berikut :

Flowchart 2 :
Perbandingan Jumlah Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025



Dari *flowchart* dapat dilihat bahwa :

Jumlah Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada dokumen (DPA) Tahun 2025 sama dengan jumlah kegiatan pada RENJA Tahun 2025. Sementara itu, terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak dianggarkan pada RENJA DPMPTSP Tahun 2025, namun dianggarkan dalam RENSTRA 2021-2026.

3.3 Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA DPMPTSP

Perbandingan antara jumlah Sub Kegiatan dalam DPA, RENJA dan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada *flowchart* berikut :

Flowchart 3 :
Perbandingan Jumlah Sub Kegiatan DPA, RENJA dan RENSTRA pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2025



Dari *flowchart* diatas dapat dilihat bahwa :

Jumlah Sub Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan RENJA Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Sub kegiatan tidak dianggarkan pada DPA Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung tahun 2025. Sementara itu, terdapat 5 (satu) sub kegiatan yang tidak dianggarkan pada RENJA DPMPTSP Tahun 2025, namun dianggarkan dalam RENSTRA 2021-2026.

BAB IV CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM ATAU KEGIATAN RENJA DPMPTSP

4.1 Capaian Target Indikator Kinerja Sasaran

Adapun capaian kinerja indikator sasaran RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Pencapaian Target Indikator Sasaran

N o	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satu an	Target Kinerja Sasaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Meningkatkan Realisasi Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tana Tidung	Realisasi Investasi PMA	Milyar	450.000.000.000	363.267.087.457	80,73%	T	
			Realisasi Investasi PMDN	Triliun	1.658.201.892.166	844.469.593.556	50,92%	R	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	94,50	96,11	101,70 %	ST	

Dari Tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sasaran** dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMA sampai Triwulan IV Rp. 363.267.087.457 dan realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi PMDN sampai Triwulan IV Rp. 844.469.593.556 dan pada indikator kinerja sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian pada akhir Tahun 2025 yaitu 96,11%.

4.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program

Capaian Indikator Kinerja Program RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Pencapaian Target Indikator Kinerja Program

No	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	95,65%	95,65%	ST	
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pembuatan Dokumen Kebijakan Penanaman Modal	%	100	100	100%	ST	
3	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor yang akan berinvestasi	Investor	2	2	100%	ST	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	78,57	86,11	109,60%	ST	
5	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Kegiatan Usaha yang memenuhi Aspek Legal	%	90	98	108,89%	ST	
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dtindaklanjuti	%	100	100	100%	ST	
		Persentase Pengaduan yang terselesaikan/tertangani sesuai SOP	%	100	100	100%	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Program** dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja program belum tersedia di Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 6 Program, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Program, Status Sedang (S) sebanyak 0 Program, Status Rendah (R) sebanyak 0 Program dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 0 Program. Adapun capaian indikator kinerja Program Sangat Tinggi disebabkan realisasi indikator kinerja Program karena data tersebut tersedia pada akhir tahun 2025.

4.3 Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Target Indikator Kinerja Kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Pencapaian Target Indikator Kinerja Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	%	100	100	100%	ST	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100%	ST	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	100	100%	ST	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Umum	%	100	100	100%	ST	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100%	ST	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Layanan Umum Perkantoran	%	100	66,83	66,83%	S	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100%	ST	
8	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Regulasi dan/atau Kebijakan Penanaman Modal	%	100	100	100%	ST	
9	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal - Level Tk. Nasional - Level Tk. Provinsi	Dokumen	2	1	50%	SR	
		Jumlah Negara/Daerah yang menjadi sasaran promosi	Dokumen	1	1	100%	ST	
10	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang melaporkan kegiatan Penanaman Modal secara Akuntabel dan Tepat Waktu	%	100	86,11	86,11%	T	

No	Nama Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
11	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	%	85	104	122,35%	ST	
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi terkait pengaduan yang tersampaikan	%	100	100	100%	ST	
		Jumlah Responden yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat	Responden	200	212	106%	ST	
		Persentase konsultasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai SOP	%	100	100	100%	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Kegiatan** dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja kegiatan Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 10 Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 1 Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 0 Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 1 Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja Kegiatan tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.

4.4 Capaian Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Adapun capaian kinerja indikator sub kegiatan RENJA yang dievaluasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung adalah seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Pencapaian Target Indikator Sub Kegiatan

No	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian Target	Kategori Kinerja (Status)	Ket
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100%	ST	
2	Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Laporan	22	22	100%	ST	

Bab IV Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program atau Kegiatan RENJA
DPMPTSP

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	322	322	100%	ST	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	100%	ST	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	6	6	100%	ST	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	100%	ST	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100%	ST	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100%	ST	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	100%	ST	
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100%	ST	
11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	11	11	100%	ST	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100%	ST	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100%	ST	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	50%	R	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	100%	ST	
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	100%	ST	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	1	1	100%	ST	
18	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian	Dokumen	1	1	100%	ST	

Bab IV Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program atau Kegiatan RENJA
DPMPTSP

	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						
19	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2	1	50%	R	
20	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100%	ST	
21	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	100	471	471%	ST	
22	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Pelaku Usaha	80	32	40%	SR	
23	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	15	30	200%	ST	
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	6	2	33,33%	SR	
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	60	26	43,33%	SR	
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kegiatan Usaha	15	4	26,67%	SR	
27	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	3	3	100%	ST	

Dari tabel pencapaian target **Indikator Kinerja Sub Kegiatan** rata - rata pencapaian kinerja pada Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar **111,59%** terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 21 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 0 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 2 Sub Kegiatan dan status Sangat Rendah (SR) sebanyak 4 Sub Kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sub kegiatan sangat rendah disebabkan realisasi indikator kinerja sub kegiatan belum tersedia karena data tersebut baru tersedia pada akhir tahun 2025.

4.5 Pencapaian Target Anggaran

Adapun realisasi anggaran RENJA yang dievaluasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Pencapaian Target Anggaran

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran			Persentase Realisasi Anggaran RENJA	Persentase Realisasi Anggaran DPA P	Kategori Kinerja Anggaran (Status)
		Pagu RENJA	Pagu DPA Perubahan	Realisasi			
2.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.326.000.000	6.140.743.378	5.777.278.555	78,85%	94,08%	ST
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	5.517.420.000	5.299.400.778	3.268.737.924	59,24%	61,68%	T
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.999.600	3.213.500	3.211.400	11,90%	99,93%	ST
2.18.01.2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.000.600	1.806.200	1.805.000	15,04%	99,93%	ST
2.18.01.2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.999.000	1.407.300	1.406.400	9,38%	99,94%	ST
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.227.734.832	3.956.421.200	3.934.351.158	93,06%	99,44%	ST
2.18.01.2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.062.014.832	3.797.651.200	3.785.481.158	93,19%	99,68%	ST
2.18.01.2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	165.720.000	158.770.000	148.870.000	89,83%	93,76%	ST
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.447.000	23.665.000	21.747.526	10,91%	91,90%	ST
2.18.01.2.05.00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	31.185.000		0	0%	0%	SR
2.18.01.2.05.00 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	104.262.000	23.665.000	21.747.526	20,85%	91,90%	ST
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	597.325.938	842.703.018	792.684.653	132,70%	94,06%	ST
2.18.01.2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	27.443.500	54.887.000	27.440.000	99,98%	49,99%	SR

Bab IV Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Program atau Kegiatan RENJA
DPMPTSP

	Kantor						
2.18.01.2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.223.000	221.044.500	203.653.850	233,49%	93,49%	ST
2.18.01.2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.130.238	122.191.918	120.511.000	100,32%	98,62%	ST
2.18.01.2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.668.200	43.047.600	42.650.600	72,70%	99,08%	ST
2.18.01.2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	303.861.000	401.532.000	398.429.203	131,12%	99,23%	ST
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48.188.660	48.188.660	46.842.800	97,21%	97,21%	ST
2.18.01.2.07.00 05	Pengadaan Mebel	48.188.660	48.188.660	46.842.800	97,21%	97,21%	ST
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.416.400	325.946.400	171.973.409	54,18%	52,76%	R
2.18.01.2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100%	100%	ST
2.18.01.2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.594.000	139.124.000	138.820.000	106,30%	99,78%	ST
2.18.01.2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.822.400	182.822.400	29.153.409	15,95%	15,95%	SR
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.307.570	99.263.000	98.051.000	59,67%	98,78%	ST
2.18.01.2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.480.000	67.680.000	66.763.000	87,29%	98,64%	ST
2.18.01.2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.830.000	19.290.000	19.080.000	68,56%	98,91%	ST
2.18.01.2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.997.570	12.293.000	12.208.000	20,35%	99,31%	ST
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	179.980.800	158.694.000	106.814.221	59,35%	67,31%	S
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	179.980.800	158.694.000	106.814.221	59,35%	67,31%	S
2.18.02.2.01.00 04	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	179.980.800	158.694.000	106.814.221	59,35%	67,31%	S
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	535.974.300	210.792.100	158.811.603	29,63%	75,34%	S
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	535.974.300	210.792.100	158.811.603	29,63%	75,34%	S
2.18.03.2.01.00 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	109.995.500	125.261.000	75.146.543	68,32%	59,99%	R
2.18.03.2.01.00 03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	425.978.800	85.531.100	83.665.060	19,64%	97,82%	ST
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	924.614.200	280.732.100	276.206.785	29,87%	98,39%	ST
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	924.614.200	280.732.100	276.206.785	29,87%	98,39%	ST
2.18.04.2.01.00 06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	397.451.900	188.742.700	186.973.630	47,04%	99,06%	ST
2.18.04.2.01.00 07	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	152.378.000	33.885.100	32.861.055	21,56%	96,98%	ST

2.18.04.2.01.00 08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	378.784.300	58.104.300	56.372.100	14,88%	97,02%	ST
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	120.000.000	94.048.500	81.270.800	67,72%	86,41%	T
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	94.048.500	81.270.000	67,72%	86,41%	T
2.18.05.2.01.00 04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	40.000.000	33.727.500	25.206.400	63,01%	74,74%	S
2.18.05.2.01.00 05	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	40.000.000	29.117.000	25.160.400	62,90%	86,41%	T
2.18.05.2.01.00 06	Pengawasan Penanaman Modal	40.000.000	31.204.000	30.904.000	77,26%	99,04%	ST
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	48.010.700	97.075.900	85.313.500	177,70%	87,88%	T
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.010.700	97.075.900	85.313.500	177,70%	87,88%	T
2.18.06.2.01.00 02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48.010.700	97.075.900	85.313.500	177,70%	87,88%	T

Dari tabel pencapaian target anggaran dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi Anggaran Pagu DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar **Rp. 5.777.278.555** atau **78,85%** dan Realisasi Anggaran Pagu RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan IV (31 Desember 2025) sebesar **Rp. 5.777.278.555** atau **94,08%**.
2. Status pencapaian realisasi anggaran pada Triwulan IV (31 Desember 2025) terdiri dari Status Sangat Tinggi (ST) sebanyak 20 Sub Kegiatan, Status Tinggi (T) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Sedang (S) sebanyak 2 Sub Kegiatan, Status Rendah (R) sebanyak 1 Sub Kegiatan dan Status Sangat Rendah (SR) sebanyak 2 Sub Kegiatan.

BAB V

KENDALA ATAU PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM ATAU KEGIATAN

Dalam Pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung ditemukan beberapa kendala/permasalahan sebagai berikut :

1. Penyerapan Anggaran Triwulan IV (31 Desember 2025) Sangat Tinggi sebesar **94,08%**.
2. Terdapat beberapa Sub Kegiatan dalam penyerapan anggaran Triwulan IV masih sangat rendah hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran sehingga pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan belum berjalan maksimal.
3. Terdapat beberapa Sub Kegiatan dengan capaian kinerja Sub Kegiatan yang masih rendah atau sangat rendah, hal ini disebabkan data capaian kinerja Sub Kegiatan diperoleh akhir Tahun 2025.

Adapun Faktor Penghambat Pencapaian target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung juga memiliki hambatan dan kendala – kendala baik dari segi bidang urusan maupun program kegiatan, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Faktor Penghambat Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. Adanya efisiensi sehingga tidak dapat dilaksanakan
2. Kurangnya kolaborasi antara OPD terkait pemenuhan data potensi daerah yang akurat
3. Pengawasan masih dalam proses.
4. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM.
5. Kurangnya ketersediaan dana dalam memenuhi pelaksanaan tugas Penanaman Modal diantaranya Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM, Bimbingan Pelatihan, Pengawasan dan Penyelesaian Permasalahan terhadap Pelaku Usaha.

6. Kewenangan Pengawasan terhadap Perusahaan PMA berada ditingkat Provinsi sehingga kewajiban dalam pelaporan LKPM tidak rutin dilaksanakan yang mengakibatkan kurangnya pencapaian realisasi investasi.
7. Rendahnya Pengetahuan Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan Regulasinya.
8. Pengawasan hanya dapat terlaksana untuk beberapa perusahaan saja, dikarenakan keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pengawasan dan keterbatasan anggaran.
9. Belum tersedianya pelatihan SDM dalam bidang ini untuk meningkatkan kompetensi.

B. Faktor Penghambat Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

1. Ketersediaan sarana penunjang perlengkapan elektronik yang belum maksimal terpenuhi.
2. Belum optimalnya pengembangan kapasitas SDM Pelayanan.
3. Masih terdapat ketentuan peraturan daerah yang belum dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

C. Faktor Penghambat Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.
2. Kurangnya Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan.
3. Belum pernah mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Pelayanan Publik.

D. Faktor Penghambat Program / Kegiatan

1. Capaian Kinerja yang belum sesuai dengan target yang telah direncanakan.
2. Mekanisme penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Tidung menggunakan Aplikasi SIPD RI terbaru, terkendala jeleknya jaringan

server Aplikasi, hal ini berdampak pada lambatnya kinerja pencairan penganggaran yang harus dilaksanakan berulang, sehingga tidak sesuai dengan TIME SCHEDULE yang telah direncanakan.

3. Beberapa anggaran di Sub Kegiatan Renja berbeda dengan anggaran DPA.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Tidung pada tahun anggaran 2025 telah berusaha menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan program - program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Pada tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung melaksanakan 6 (enam) Program yang terbagi atas 12 (dua belas) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan.

Secara umum realisasi fisik dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada Triwulan IV Tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun rata - rata pencapaian kinerja **111,59%** (Kategori Sangat Tinggi) dan Realisasi Keuangan mencapai **Rp. 5.777.278.555,-** atau rata - rata capaian Anggaran **94,08%** (Kategori Sangat Tinggi).

6.2 Rekomendasi

Laporan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana program, kegiatan dan sub kegiatan telah dilaksanakan dan juga merupakan landasan penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tana Tidung.

Oleh sebab itu, adapun beberapa rekomendasi / saran sebagai tindak lanjut evaluasi bagi pelaksanaan RENJA DPMPTSP pada triwulan IV berikut, yaitu:

1. Perlu peningkatan pemahaman dan komitmen dari seluruh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pimpinan agar tercipta konsistensi

antara kinerja dan anggaran sehingga target sasaran dan program dalam RENJA dan RENSTRA dapat tercapai.

2. Perlunya peningkatan pemahaman dan kemampuan teknis Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kinerja melalui Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
3. Seluruh pegawai Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menganalisis setiap faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat dilakukan pengendalian dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal.
4. Mengoptimalkan koordinasi antar bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga setiap program / kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

L A M P I R A N

LAPORAN REKAP REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK DAN KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2025 KEADAAN BULAN JANUARI - DESEMBER

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KERJA KELUARAN (OUTPUT)		BOBOT	JUMLAH DANA / DPA	REALISASI (RP)		REALISASI (%)		TERTIMBANG %		SISA ANGGARAN	KET
		TOLAK UKUR	SATUAN			KEUANGA	FISIK	KEUANGA	FISIK (%)	KEUANGA	FISIK (%)		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN			86,30	5,299,400,778	5,068,861,946	96,79	82,54	83,53			230,538,832	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi			0,05	3,213,500	3,211,400	99,93	0,05	0,05			2,100	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	0,03	1,806,200	1,805,000	99,93	0,03	0,03			1,200	
2.18.01.2.01.0006	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,03	1,806,200	1,805,000	99,93	0,03	0,03			1,200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan	22 Laporan	0,02	1,407,300	1,406,400	99,94	0,02	0,02			900	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,02	1,407,300	1,406,400	99,94	0,02	0,02			900	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			64,43	3,956,421,200	3,934,351,158	99,44	64,07	64,43			22,070,042	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	322	61,84	3,797,651,200	3,785,481,158	99,68	61,65	61,84			12,170,042	
2.18.01.2.02.0002	Dana Alokasi Umum - Belanja Operasi			61,84	3,797,651,200	3,785,481,158	99,68	61,65	61,84			12,170,042	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan	12 Dokumen	2,59	158,770,000	148,870,000	93,76	2,42	2,59			9,900,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			2,59	158,770,000	148,870,000	93,76	2,42	2,59			9,900,000	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat			0,39	23,665,000	21,747,526	91,90	0,35	0,37			1,917,474	
2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	6 Orang	0,39	23,665,000	21,747,526	91,90	0,35	0,37			1,917,474	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,39	23,665,000	21,747,526	91,90	0,35	0,37			1,917,474	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			13,72	842,703,018	792,684,653	94,06	12,91	13,41			50,018,365	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	0,89	54,887,000	27,440,000	49,99	0,45	0,58			27,447,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,89	54,887,000	27,440,000	49,99	0,45	0,58			27,447,000	
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Paket Peralatan dan	4 Paket	3,60	221,044,500	203,653,850	92,13	3,32	3,60			17,390,650	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal			3,60	221,044,500	203,653,850	92,13	3,32	3,60			17,390,650	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	4 Paket	1,99	122,191,918	120,511,000	98,62	1,96	1,99			1,680,918	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			1,99	122,191,918	120,511,000	98,62	1,96	1,99			1,680,918	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	2 Paket	0,70	43,047,600	42,650,600	99,08	0,69	0,70			397,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,70	43,047,600	42,650,600	99,08	0,69	0,70			397,000	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	12 Laporan	6,54	401,532,000	398,429,203	99,23	6,49	6,54			3,102,797	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			6,54	401,532,000	398,429,203	99,23	6,49	6,54			3,102,797	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang			0,78	48,188,660	46,842,800	97,21	0,76	0,78			1,345,860	
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	11 Unit	0,78	48,188,660	46,842,800	97,21	0,76	0,78			1,345,860	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Modal			0,78	48,188,660	46,842,800	97,21	0,76	0,78			1,345,860	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			5,31	325,946,400	171,973,409	52,76	2,80	2,87			153,972,991	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	0,07	4,000,000	4,000,000	100	0,07	0,07			0	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,07	4,000,000	4,000,000	100	0,07	0,07			0	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2,27	139,124,000	138,820,000	99,78	2,26	2,27			304,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			2,27	139,124,000	138,820,000	99,78	2,26	2,27			304,000	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	2,98	182,822,400	29,153,409	15,95	0,47	0,54			153,668,991	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			2,98	182,822,400	29,153,409	15,95	0,47	0,54			153,668,991	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1,62	99,263,000	98,051,000	98,78	1,60	1,62			1,212,000	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit	1,10	67,680,000	66,763,000	98,65	1,09	1,10			917,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			1,10	67,680,000	66,763,000	98,65	1,09	1,10			917,000	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	0,31	19,290,000	19,080,000	98,91	0,31	0,31			210,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,31	19,290,000	19,080,000	98,91	0,31	0,31			210,000	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan	1 Unit	0,20	12,293,000	12,208,000	99,31	0,20	0,20			85,000	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			0,20	12,293,000	12,208,000	99,31	0,20	0,20			85,000	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM			2,58	158,694,000	106,814,221	67,31	1,74	1,94			51,879,779	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif			2,58	158,694,000	106,814,221	67,31	1,74	1,94			51,879,779	
2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang	Jumlah rekomendasi kebijakan	1 Dokumen	2,58	158,694,000	106,814,221	67,31	1,74	1,94			51,879,779	
	Dana Bagi Hasil - Belanja Operasi			2,58	158,694,000	106,814,221	67,31	1,74	1,94			51,879,779	

D O K U M E N T A S I

**Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Kegiatan Pengawasan PT. Pipit Citra Perdana Estate Menjelutung
Selasa 09 September 2025**



**Kegiatan Laporan Pendahuluan Penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Kabupaten Tana Tidung**



**Kegiatan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Kabupaten Tana Tidung**



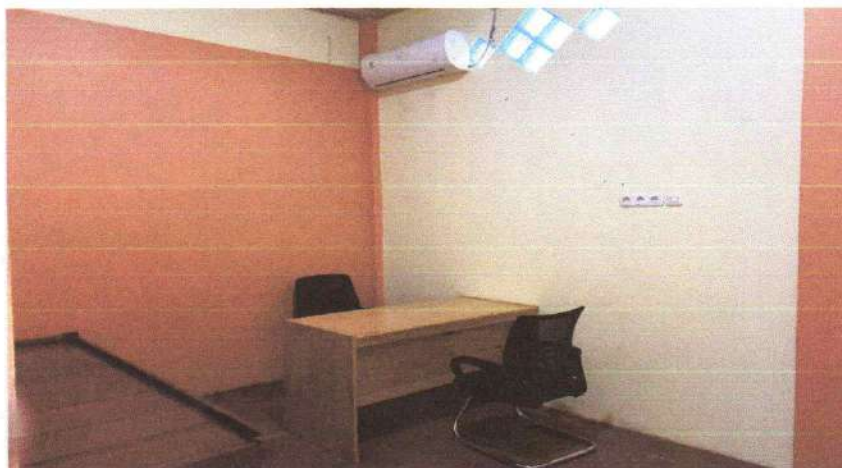
Dokumentasi Perjanjian Kerjasama antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata dengan DPMPTSP Kabupaten Tana Tidung tentang Pemanfaatan Fasilitas Komersial



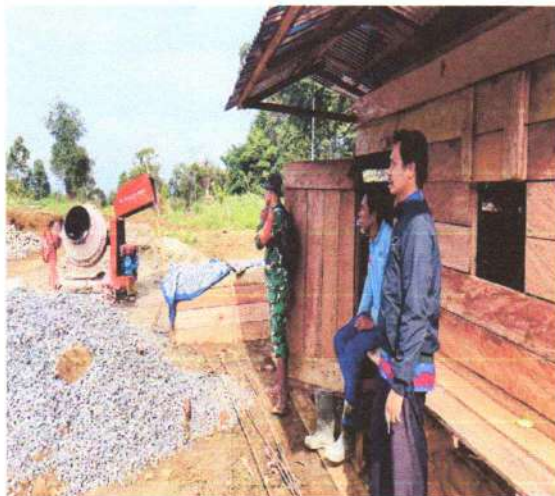
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan diruang Bidang Pelayanan



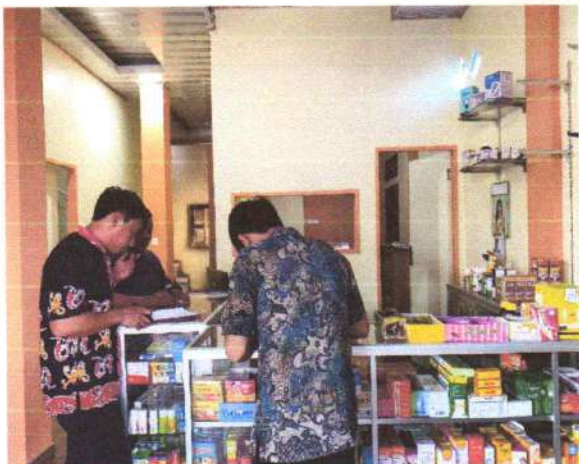
KEGIATAN PENINJAUAN LAPANGAN/PEMANTAUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



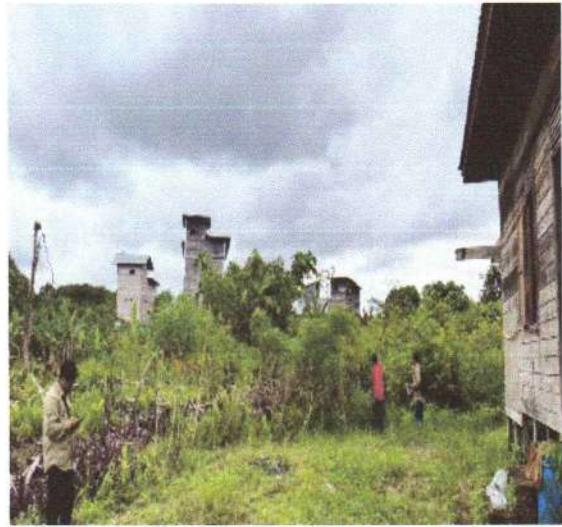
KEGIATAN PENINJAUAN LAPANGAN/PEMANTAUAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN



Kegiatan Peninjauan Lapangan (Proses Penerbitan Perizinan dan Pengawasan Kegiatan)



Kegiatan Peninjauan Lapangan (Pelaksanaan pengumpulan data kegiatan mendampingi BPN terhadap penerbitan sertifikat tanah)



**KEGIATAN PELAYANAN BERGERAK SISTEM INFORMASI
PELAYANAN MENJANGKAU (SINANJANG)
DAN SISTEM IZIN PRAKTIS (SIP)**



Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan



Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis



Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan
SOSIALISASI LAYANAN ADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI KECAMATAN MURUK RIAN TAHUN 2025



SOSIALISASI LAYANAN ADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN BETAYAU TAHUN 2025



KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 2025



KEGIATAN SOSIALISASI LAYANAN ADUAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

